

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI USAHA
KONSERVASI DANAU RAWA PENING DESA KEBONDOWO KECAMATAN
BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG**

Oleh

Windra Hariyani, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih

windrahariyani@gmail.com, hestilestari1959@gmail.com, dewi_sabowo@yahoo.co.id

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id/> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze community empowerment management as a conservation effort for Rawa Pening Lake in Kebondowo Village and (2) identify and analyze the driving and inhibiting factors in community empowerment as a conservation effort for Rawa Pening Lake in Kebondowo Village. In this study using qualitative methods with research subjects consisting of the Head of Kebondowo Village, the community in Kebondowo Village, the Semarang Regency Environmental Service, and the Semarang Regency Community and Village Empowerment Service. Data collection in this study was carried out by means of observation, documentation, and interviews. The techniques used in analyzing the data are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show: (1) community empowerment management as a conservation effort for Rawa Pening Lake is described through the functions of planning, organizing, directing, motivating, and controlling or supervising. In community empowerment as a conservation effort, Rawa Pening Lake has carried out these functions, but is still not perfect. In the planning function, there is still an unclear vision and mission, as well as standards that have not been set. The organizing function, facilities and infrastructure in supporting community empowerment activities are still not as needed. In the directive function, it has not been able to change the behavior of the entire Kebondowo Village community, due to the different quality of human resources so that community acceptance is different. The motivational function has been carried out well, where the community has responsibility, discipline, and enthusiasm. In control and supervision, the results and impact assessments have not used the standards set at the planning stage. The supporting factors consist of village potential, the presence of environmental cadres, and community enthusiasm, while the inhibiting factors consist of budget, human resources, there is no collaboration between agencies, and internal and external communication.

Keyword : Management, Community Empowerment, Conservation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Danau Rawa Pening termasuk ke dalam salah satu 15 prioritas danau nasional yang akan ditangani bersama dalam menjaga kelestarian dan potensi danau. Danau Rawa Pening terletak di empat kecamatan yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan, Tuntang, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Banyubiru dengan luas mencapai 6.488,6 ha pada musim penghujan dan 1.650 ha pada musim kemarau. Danau Rawa Pening memiliki banyak manfaat dan menjadi sumber kehidupan bagi 46.076 petani, 27.739 buruh tani, 2.205 nelayan, 3.746 pengusaha, dan 2.239 peternak atau perikanan. Danau Rawa Pening berfungsi sebagai air baku rumah tangga dan industri, saluran irigasi untuk pertanian, kegiatan budidaya perikanan, industri pariwisata, sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jelok, kerajinan eceng gondok, dan pemanfaatan gambut untuk bahan dasar pupuk kompos.

Banyaknya potensi dan manfaat dari Danau Rawa Pening, tidak terlepas dari permasalahan lingkungan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang 2016-2021, disebutkan permasalahan yang dihadapi oleh Danau Rawa Pening diantaranya yaitu laju sedimentasi yang tinggi dari 9 anak sungai, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali mengakibatkan pendangkalan danau, turunnya sumber daya ikan, pencemaran lingkungan, turunnya kualitas air, konflik kepentingan dalam pemanfaatan Danau Rawa Pening, belum optimalnya konservasi, belum optimalnya kelembagaan dan implementasi kebijakan, tanggung jawab dan kewenangan yang tumpang tindih, serta minimnya pemberdayaan masyarakat.

Di dalam mengatasi permasalahan Danau Rawa Pening, pemerintah melaksanakan berbagai upaya konservasi,

salah satunya dengan membentuk Germadan (Gerakan Penyelamatan Danau Rawa Pening). Germadan merupakan gerakan rencana pengelolaan pada kelembagaan dan rencana aksi yang mengikutsertakan *stakeholders* dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama yaitu pengelolaan dan konservasi danau. Germadan memiliki beberapa tujuan yaitu, mengaplikasikan teknologi dan sains untuk pengelolaan badan air dan Daerah Tangkapan Air (DTA), menciptakan perkembangan pengelolaan dan kebijakan Danau Rawa Pening yang didukung adanya kelembagaan yang baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses manajemen dan konservasi Danau Rawa Pening.

Di dalam pelaksanaannya, Germadan kurang menciptakan dampak yang signifikan dalam usaha memperbaiki dan penyelesaian permasalahan di Danau Rawa Pening. Dilihat dari segi kelembagaan, Germadan belum mampu mensinergikan

kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, selain itu partisipasi masih kurang sempurna dalam menyusun rencana dan melaksanakan program. Di dalam pelaksanaannya, Germadan belum terdapat upaya penegakan aturan dan minimnya insentif baik ekonomi maupun sosial.

Tujuan pada pengelolaan kawasan konservasi yaitu bagaimana mengintegrasikan tujuan konservasi, nilai budaya masyarakat, dan tujuan ekonomi (Sudirman & Massiri, 2022). Di dalam konservasi Danau Rawa Pening, tujuan konservasi tidak terintegrasi yaitu pada kegiatan pengerukan eceng gondok yang bertentangan dengan tujuan ekonomi yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan kerajinan dari eceng gondok.

Pemberdayaan masyarakat pada sekitar Danau Rawa Pening, memiliki ciri khas berbeda-beda yaitu pada tabel berikut.

No.	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat
1	Bawen	Pertanian dan peternakan
2	Tuntang	Pupuk kompos dan kerajinan eceng gondok.
3	Ambarawa	Kelompok nelayan, budidaya perikanan, perikanan tangkap, dan desa wisata.
4	Banyubiru	Pertanian, peternakan, budidaya perikanan, perikanan tangkap, kerajinan eceng gondok, perkebunan, dan pariwisata.

Sumber : Data Observasi April Mei 2021

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Banyubiru memiliki banyak kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat. Desa Kebondowo menjadi salah satu desa di Kecamatan Banyubiru yang melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pada

bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan eceng gondok, perkebunan, dan pariwisata. Hal tersebut dikarenakan letak yang strategis dengan Danau Rawa Pening dan sebagian besar wilayah Desa Kebondowo adalah tanah rawa yaitu seluas 252.70 ha. Luas yang strategis tersebut, menjadikan Desa Kebondowo memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat.

Cukup beragamnya program pemberdayaan masyarakat di Desa Kebondowo, ternyata belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan masih ditemukan berbagai permasalahan diantaranya kurangnya kemajuan usaha kerajinan eceng gondok, masyarakat masih bergantung pada arahan dan program dari pemerintah desa, tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang dilihat pada banyaknya masyarakat Desa Kebondowo yang tidak sekolah yaitu 1.747 dan lulusan SD sebanyak 306 jiwa. Sebagian masyarakat masih bekerja menjadi buruh yang penghasilannya tidak pasti, dan indeks

kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 13,92%. Pada sisi lain, pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan eceng gondok juga masih bertentangan dengan tujuan konservasi Danau Rawa Pening. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang?.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (Keban, 2014:3), mengartikan administrasi publik merupakan sebuah cara atau metode mengkoordinasikan sumberdaya serta personil publik untuk merumuskan, menerapkan, dan melakukan pengelolaan terhadap ketetapan dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai sebuah ilmu dan seni (*science and art*) yang bertujuan untuk mengatur *public affairs* dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Administrasi publik memiliki

tujuan untuk menyelesaikan dan memberi solusi bagi permasalahan publik dengan memperbaiki atau menyempurnakan terutama pada bidang organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

Administrasi publik menurut Yogi (Kamaruddin, 2016:41-42), mengacu pada kata publik yang diartikan sama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diartikan secara luas yaitu kalangan umum dan keseluruhan rakyat. Seperti pada contoh kata “republik” yang memiliki arti kembali ke publik dimana seluruh urusan dikembalikan kepada publik dan publik memegang kekuasaan paling tinggi. Kata publik sangat cocok dipasangkan dengan administrasi yang mengandung arti pengelolaan bersama kepentingan publik.

Michael M. Hormon dan Richard T. Mayer (Kamaruddin, 2016:43), mengartikan administrasi publik sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Orang-orang tersebut meliputi organisasi atau instansi publik,

pegawai negeri, komisi dan korporasi publik serta gugus resmi yang melaksanakan mandat untuk kepentingan publik.

Berdasarkan paparan para ahli diatas, , dapat diartikan administrasi publik yaitu serangkaian proses kerja diantaranya merumuskan, menerapkan, dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan resmi dan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi publik serta seluruh pegawai negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yaitu masyarakat secara umum, termasuk didalamnya terdapat koordinasi antar badan atau perorangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tersebut.

2. Manajemen Publik

Pygors dan Myeers (Keban, 2014:91), mengartikan manajemen sebagai “sebuah hasil atau proses yang didapatkan melalui kerja orang lain”. Pernyataan tersebut memiliki beberapa elemen penting yaitu, pertama manajemen merupakan proses

keterlibatan yang didasarkan adanya kesatuan ; kedua, proses tersebut dilaksanakan oleh individu-individu yang dipimpin oleh manajer; ketiga, kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu.

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (Sarinah, 2017:1), menjelaskan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajer dalam rangka mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pada pekerjaan orang lain, sehingga mampu menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien.

Manajemen publik merupakan bagian ilmu dari administrasi publik yang secara eksklusif menjelaskan terkait rancangan program dan penataan kembali organisasi, distribusi dari sumber daya dengan merencanakan anggaran, mengelola keuangan, mengelola sumber daya manusia, serta melakukan penilaian suatu kegiatan serta pemeriksaan (Ott, Hyde & Shafritz dalam Wijaya, A. F, & Dinar, 2014:1).

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan bagian dalam ilmu administrasi publik yang mengkaji sebuah proses kerjasama antar kelompok maupun individu untuk mencapai tujuan bersama yaitu memenuhi kepentingan publik atau masyarakat umum. Berbeda dengan manajemen secara umum, manajemen publik lebih berfokus pada bagaimana cara manajer publik dalam mengelola internal dan eksternal dari organisasi publik yang berfokus pada penyediaan pelayanan kepada masyarakat secara luas.

3. Manajemen Lingkungan

Terdapat dua kata yaitu manajemen dan lingkungan. Atmosudirdjo mengartikan manajemen yaitu mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor dan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan untuk menggapai sebuah tujuan (Rohman, 2017:10). George Terry mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan

yang dilaksanakan dalam menetapkan dan meraih tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di organisasi (Rohman, 2017:9).

Lingkungan secara harfiah mengandung arti “ruang lingkup”, “sekitar”, “alam sekitar”, atau “masyarakat sekitar”. Lingkungan juga memiliki arti sesuatu yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup secara kolektif dan semua makhluk hidup dengan kekuatan-kekuatan alaminya. Di dalam lingkungan, dikenal adanya lingkungan hidup yang didefinisikan sebagai semua benda, daya, dan kondisi yang ada di sebuah tempat dimana manusia dan makhluk hidup lainnya saling memberikan pengaruh (Alaby dalam Sembel, 2015:6).

Muniarty dan Nurhayati menyebutkan bahwa tingkah laku, corak kepentingan, kepentingan ideologi, pandangan nilai dan lain-lain dapat menimbulkan gejala untuk lingkungan yang berkaitan dengan baik buruknya kualitas lingkungan (Indarjani et al.,

2020:53). Kualitas lingkungan sendiri sangat mempengaruhi kehidupan manusia yaitu apabila lingkungan buruk seperti pencemaran, polusi, banjir, dan sebagainya dapat berakibat buruk pula bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, disimpulkan bahwa manajemen lingkungan yaitu sebuah upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terkait dengan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin ketersediaan sumber daya melalui serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplentasian, dan pengawasan, agar dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang dan generasi masa mendatang.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan terdiri dari kata daya yang berarti “kekuatan” yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*empowerment*”. Pemberdayaan berarti memberikan daya atau kekuatan pada suatu

kelompok yang lemah untuk dapat mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan merupakan proses pemberian daya baik pemberian “kemampuan atau keberanian” ataupun daya yang diartikan sebagai kekuasaan. Di dalam proses tersebut meliputi beberapa lingkup kegiatan yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan (Mardikanto, T. & Soebianto, 2012:113)

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan yang meliputi berbagai upaya perbaikan, seperti; upaya memperbaiki pendidikan, memperbaiki aksesibilitas, memperbaiki tindakan dan kelembagaan, memperbaiki usaha, memperbaiki pendapatan, memperbaiki lingkungan, memperbaiki kehidupan dan masyarakat. Usaha perbaikan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dimana apabila satu perbaikan terpenuhi maka perbaikan berikutnya juga dapat

terpenuhi (Mardikanto, T. & Soebianto, 2012:111).

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh ahli tersebut, ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses didalam memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat melaksanakan tindakan sosial dan mengorganisasikan diri dalam menyusun perencanaan untuk memecahkan suatu masalah. Pemberdayaan sebagai sebuah proses dalam manajemen, memiliki tujuan yaitu perbaikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, aksesibilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan masyarakat.

5. Konservasi

Manajemen lingkungan atau pengelolaan pada lingkungan termasuk kedalam berbagai usaha meliputi mencegah, menanggulangi kerusakan, pencemaran, dan memulihkan kualitas lingkungan

(Geumala et al., 2018:2). Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pengelolaan dan pengendalian lingkungan meliputi usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Usaha tersebut melalui konservasi yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan lingkungan dan sumber daya secara bijaksana serta melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Konservasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan usaha yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan dengan asas pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan serasi dan seimbang.

Di dalam Bab IX Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 37 tentang peran serta masyarakat disebutkan bahwa partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dibimbing dan digerakkan oleh Pemerintah dengan mengadakan beberapa kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan memiliki peran, pemerintah memberikan pendidikan dan penyuluhan, sehingga dapat meningkat kesadaran masyarakat di konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih berdasarkan penguasaan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, mempunyai data, dan bisa memberikan jawaban secara akurat atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa

Kebondowo Kecamatan Banyubiru
Kabupaten Semarang.

PEMBAHASAN

A. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat sebagai Usaha Konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo

1. Perencanaan

Perencanaan pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo sudah dilaksanakan. Di dalam proses perencanaan tersebut, pihak-pihak yang menjalankan pemberdayaan yaitu Pemerintah Desa Kebondowo, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan tujuan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat pada Desa Kebondowo ikut berpartisipasi dalam menyalurkan ide dan gagasan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga perencanaan pada pemberdayaan

masyarakat Desa Kebondowo merupakan perencanaan yang partisipatif. Sistem anggaran dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah disusun dan diatur secara sistematis melalui musyawarah yang selanjutnya menghasilkan RPJMDes dan APBDes. Di dalam sistem anggaran tersebut sudah terdapat prioritas kebutuhan dan pelaporan penggunaan anggaran yang dipublikasikan dalam situs web Desa Kebondowo. Di dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat oleh Desa Kebondowo belum terdapat penetapan standar untuk mengukur keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo telah dilaksanakan. Di dalam proses pengorganisasian tersebut, telah dilaksanakan proses

perekrutan sumber daya manusia yang ada di kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat di Desa Kebondowo. Proses perekrutan dilakukan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat, dikarenakan kelompok pemberdayaan yang dibentuk sesuai dengan mata pencaharian masyarakat. Di dalam perekrutan pengurus dilaksanakan melalui musyawarah dusun dan musyawarah kelompok, sehingga pengurus dipilih langsung oleh masyarakat di dalam musyawarah tersebut. Adanya pengurus di dalam kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat akan memberikan kejelasan terkait tugas dan wewenang, dikarenakan setiap posisi memiliki tugas dan wewenangnya yang berbeda. Proses pengorganisasian juga meliputi koordinasi yang sudah dilakukan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui perkumpulan yang mengundang Kepala Desa untuk hadir,

selain itu koordinasi juga dilaksanakan dengan dinas-dinas terkait yaitu melalui laporan-laporan yang diberikan kepada dinas dalam jangka waktu tertentu.

Di dalam fungsi pengorganisasian terdapat pemberian sarana dan prasarana atau *facilitating*. Sarana dan prasarana telah diperoleh oleh masing-masing kelompok pemberdayaan masyarakat. Sarana dan prasarana berbeda di setiap kelompok pemberdayaan sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Pada pemberdayaan masyarakat kelompok tani, maka sarana dan prasarana yang diperoleh terkait dengan pertanian, begitupula dengan sarana dan prasarana pada kelompok nelayan maka memperoleh alat-alat dan bibit perikanan. Di dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana dinilai belum mencukupi kebutuhan. Pada bidang pertanian, Dusun Kebonsari belum menerima sarana dan prasarana di dalam menunjang

pertanian masyarakat. Di sisi lain, pada bidang pengelolaan sampah, sarana dan prasarana juga belum mencukupi kebutuhan kegiatan pemberdayaan. Sarana dan prasarana yang kurang menjadi salah satu faktor penghambat pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening sudah dilaksanakan. Di dalam pelaksanaannya bimbingan diberikan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerinatah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bimbingan yang diberikan terkait dengan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan masyarakat yaitu pada bidang pengelolaan sampah, pertanian, perikanan, pengelolaan Bumdes,

pengelolaan keuangan dan aset desa, dan bimbingan KPM (Kader Pembangunan Manusia).

Di dalam proses bimbingan tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah mengubah mindset masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan, mengelola pertanian dengan baik untuk tujuan konservasi tanah, dan pembibitan ikan dengan baik. Hasil dari adanya fungsi pengarahan ini belum maksimal, dimana masyarakat belum semua menerapkan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sudah banyak masyarakat yang paham tentang pengelolaan sampah, tetapi beberapa masyarakat masih mengelola sampah secara tradisional, meskipun memang tidak mengotori dan mencemari Danau Rawa Pening. Pada bidang pertanian, masyarakat masih menggunakan bahan kimia dalam membasmi hama, dimana hal tersebut dapat mencemari danau ketika larut dengan air hujan. Solusi

untuk membasmi hama secara alami tanpa pestisida belum ditemukan hingga saat ini, sehingga masyarakat tetap menggunakan bahan kimia atau pestisida.

4. Permotivasian

Fungsi permotivasian pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening sudah dilaksanakan. Pemberian motivasi diberikan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Motivasi diberikan pada kegiatan sosialisasi yang rutin dilaksanakan, tetapi hasil yang diperoleh tidak maksimal dan tidak bisa diukur karena penerimaan masyarakat yang satu berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada Desa Kebondowo sangat beragam dan masih tergolong rendah, hal tersebut disebabkan masih adanya masyarakat

yang tidak/belum sekolah dan hanya lulus sekolah dasar.

Pada fungsi permotivasian di pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo, sudah sesuai dengan indikator motivasi yang disampaikan oleh Rozalita, Gistuti, dan Rusdinal (Ar et al., 2021:3630). Di dalam motivasi yang baik terdapat tiga indikator yaitu tanggung jawab, disiplin, dan semangat. Masyarakat di Desa Kebondowo bertanggung jawab terhadap peran masing-masing sesuai dengan posisi, sebagai contoh pengurus setiap kelompok pemberdayaan yang memiliki tanggung jawab pada tugasnya. Kedisiplinan masyarakat dapat diamati pada antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan dan pengarahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening, selain itu masyarakat juga hadir dalam musyawarah dusun maupun

musyawarah desa untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan atau program selanjutnya yang dibutuhkan masyarakat. Semangat masyarakat Desa Kebondowo terbilang tinggi, hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat salah satunya pada Dusun Kebonsari, dimana masyarakat antusias meminta untuk diadakan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat Desa Kebondowo juga menunjukkan perubahan yang positif dalam pengelolaan sampah, hal tersebut menunjukkan semangat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Pengendalian atau Pengawasan

Fungsi pengendalian dan pengawasan pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening sudah dilaksanakan. Di Desa Kebondowo, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan belum maksimal, hal tersebut dikarenakan kelompok pemberdayaan dan pemerintah desa belum menetapkan standar yang sesuai

sebagai alat ukur dalam menilai kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Standar yang belum jelas menyebabkan penilaian menjadi kurang tepat. Pemerintah Desa menilai bahwa hasil dari kegiatan pemberdayaan telah mampu menghasilkan sarana dan prasarana serta mengubah *mindset* masyarakat terkait pelestarian lingkungan Danau Rawa Pening, meskipun belum seluruhnya. Masyarakat pada Desa Kebondowo dan Pemerintah Desa juga telah mampu dalam mengadakan tindakan perbaikan melalui musyawarah untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

B. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat dalam Manajemen Pemberdayaan Masyarakat sebagai Usaha Konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo

1. Faktor-faktor Pendorong

a. Potensi Desa

Potensi Desa Kebondowo menjadi salah satu faktor pendorong dalam melaksanakan fungsi perencanaan di pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening. Potensi-potensi desa yang sangat mendukung memberikan banyak ide atau gagasan untuk merencanakan suatu program dan mengembangkan masyarakat Desa Kebondowo kearah yang lebih baik. Pada potensi fisik yang dimiliki oleh Desa Kebondowo yaitu lahan, tanah, iklim, lingkungan geografis, ternak, dan air dapat dibuat perencanaan pemberdayaan masyarakat pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan melalui kegiatan pemberdayaan. Pada sisi lain, potensi-potensi tersebut juga menjadi faktor pendorong agar masyarakat dapat merencanakan berbagai program dalam rangka mempertahankan potensi fisik yang dimiliki.

b. Adanya Kader-kader Lingkungan

Kader-kader lingkungan yang terdapat di Desa Kebondowo merupakan salah satu faktor pendorong dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian, di dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening. Kader-kader lingkungan menjadi salah satu sumber daya manusia yang strategis dan memiliki peran pendukung. Kader-kader lingkungan menjadi kepanjangan tangan dari dinas-dinas dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan sampah agar tidak mencemari Danau Rawa Pening. Adanya pendelegasian wewenang tersebut menjadikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening dapat lebih efektif. Kader-kader lingkungan juga membantu dinas dalam menangani berbagai

permasalahan terkait lingkungan seperti pembersihan sampah pasca bencana banjir.

c. Antusiasme Masyarakat

Antusiasme masyarakat Desa Kebondowo menjadi salah satu faktor pendorong di dalam pelaksanaan fungsi pengarahan. Di dalam fungsi pengarahan, masyarakat diberikan bimbingan dan pelatihan terkait program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kelompok pemberdayaan yang masyarakat ikuti. Antusiasme masyarakat yang tinggi sangat mendukung keberhasilan dari pengarahan dan bimbingan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan Dinas terkait, dikarenakan masyarakat memiliki kemauan dan semangat untuk mengikuti, menyimak dan memahami setiap arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Pemerintah Desa maupun dinas-dinas terkait.

2. Faktor-faktor Penghambat

a. Anggaran

Anggaran menjadi salah satu faktor penghambat untuk semua pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen baik pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, permotivasi, hingga pengendalian dan pengawasan. Anggaran merupakan faktor penghambat terutama pada pelaksanaan perencanaan suatu program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening. Anggaran dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo disusun melalui musyawarah desa untuk membuat RPJMDes dan APBDes. Di dalam dua dokumen tersebut, dijelaskan terkait rencana-rencana program pemberdayaan masyarakat dan berbagai kebutuhan desa lainnya serta anggaran yang diperlukan. Berdasarkan pada data di lapangan,

anggaran dalam pemberdayaan masih kurang atau belum sesuai kebutuhan, baik anggaran yang ditetapkan oleh desa, maupun anggaran dari dinas. Anggaran yang belum sesuai kebutuhan menjadi penyebab utama kegiatan tidak lancar serta sarana dan prasarana yang kurang.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kurang berkualitas menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian dan pengarahan pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Manusia adalah orangnya, sedangkan SDM atau sumber daya manusia adalah kemampuan totalitas daya pikir dan daya fisik (Marnis & Priyono, 2008:15). SDM sangat penting didalam

pengorganisasian terutama pada proses perekrutan pengurus kelompok-kelompok pemberdayaan, dimana dibutuhkan SDM yang kompeten untuk mengelola kelompok dan masyarakat di dalamnya. Pada sisi lain SDM yang memiliki daya pikir dan daya fisik yang baik dapat menerima dengan baik bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa maupun dinas-dinas, serta mewujudkannya dalam perubahan perilaku sehari-hari.

c. Tidak Ada Kolaborasi Antar Instansi

Di dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo, belum terdapat kolaborasi antara berbagai instansi terkait dan pemerintah desa untuk merencanakan suatu program bersama. Tidak adanya kolaborasi antar instansi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi

perencanaan. Di dalam perencanaan untuk program penyelamatan Danau Rawa Pening, instansi masih berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan permasalahan di Danau Rawa Pening yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan.

d. Komunikasi Eksternal dan Internal
Kurang

Komunikasi internal dan eksternal yang belum berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian atau pengawasan. Komunikasi internal yang tidak melibatkan seluruh anggota dan hanya pengurus saja menyebabkan perencanaan kurang partisipasi dari masyarakat dan dikhawatirkan tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Komunikasi eksternal yang kurang baik dapat memutus hubungan dengan eksternal, dimana pihak

eksternal juga menjadi sumber daya yang bermanfaat untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu program pemberdayaan. Di lihat dari fungsi pengendalian dan pengawasan, komunikasi internal dan eksternal yang tidak maksimal, dapat menghambat di dalam menilai *progress* dari suatu program dan menemukan solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang muncul.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat sebagai Usaha Konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang belum dilaksanakan dengan baik. Fungsi manajemen yang belum terlaksana dengan baik diantaranya fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Fungsi yang terlaksana dengan baik yaitu fungsi permotivasi. Adapun kesimpulan dari setiap fungsi manajemen pada pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan. Fungsi perencanaan pada manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening belum terlaksana dengan baik. Di dalam proses perencanaan, belum ditetapkan standar yang digunakan untuk proses pengendalian dan pengawasan, tetapi sudah terdapat tujuan, sistem anggaran, dan prosedur.
- b. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian pada manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening belum terlaksana dengan baik. Sudah terdapat perekrutan

pengurus dan anggota, namun masih menghadapi kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- c. Pengarahan. Fungsi pengarahan pada manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening belum terlaksana dengan baik. Proses pengarahan diberikan melalui bimbingan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa dan dinas-dinas terkait, akan tetapi hasil dari proses pengarahan belum maksimal karena belum semua masyarakat menerapkan pelatihan dan materi yang diterima.
- d. Permotivasi. Fungsi permotivasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo sudah dilaksanakan. Masyarakat Desa Kebondowo memiliki tanggung

jawab, disiplin, dan semangat di dalam berbagai bimbingan maupun pelatihan terkait pemberdayaan masyarakat.

- e. Pengendalian atau Pengawasan. Pengendalian dan pengawasan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo masih belum maksimal. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan tidak diukur menggunakan standar, dikarenakan belum ada penetapan standar pada fungsi perencanaan.
2. Terdapat faktor-faktor Pendorong dan Penghambat di dalam Manajemen Pemberdayaan Masyarakat sebagai Usaha Konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Faktor yang mendorong diantaranya yaitu potensi desa, adanya kader-kader lingkungan, dan antusiasme masyarakat.

Faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening diantaranya anggaran yang terbatas, sumber daya manusia pada masyarakat Desa Kebondowo yang kualitasnya masih rendah, tidak adanya kolaborasi antar instansi, dan komunikasi eksternal dan internal.

B. Saran

1. Di dalam menghadapi persoalan terkait dengan anggaran, pemerintah desa bersama masyarakat dapat mengadakan kerja sama bersama organisasi-organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain, pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak swasta banyak yang memiliki program untuk pengabdian masyarakat dan konservasi lingkungan.
2. Pemerintah Desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

terus bekerja sama dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Kebondowo secara konsisten dan terus menerus, sebagai usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dapat mengimplementasikan ide dan gagasannya, terkait pembentukan kelompok khusus yang terdiri dari berbagai lembaga. Gagasan pembentukan kelompok khusus yang terdiri dari berbagai lembaga diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi dalam perencanaan program-program untuk pengelolaan Danau Rawa Pening.
4. Komunikasi internal dan eksternal dapat diperbaiki dengan kembali mengaktifkan musyawarah dusun, musyawarah desa, dan perkumpulan rutin kelompok pemberdayaan masyarakat, dengan

mengikutsertakan pengurus dan anggota, namun masih mengikuti protokol kesehatan mengingat masih pandemi covid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, N. R., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2021). Hubungan Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Pegawai di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3629–36350. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.936>
- GEUMALA, M., Nugraha, agung putri harsa satya, Pratiwi, Y. E., & Ali, M. (2018). Manajemen Lingkungan Kesehatan Perkotaan. *Kesehatan Masyarakat*, 1(3), 107–112.
- Indarjani, Handayani, Ismainar, H., Muniarty, P., Nurhayati, Nurmayanti, I., Marlina, H., Ihwanudin, N., Angga, L. O., Syamsuriansyah, Gaffara, G. R., Hidana, R., & Harefa, S. (2020). Pengantar Ilmu Lingkungan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Kamaruddin, S. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik antara Teori dan Aplikasinya*. Ombak.
- Keban, T. Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.
- Mardikanto, T. & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

- Marnis & Priyono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Manajemen Sumber Daya Manusia*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rohman, A. (2017). *Dasar dasar manajemen*. [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab 2.pdf?sequence=11](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab%202.pdf?sequence=11)
- Sarinah. (2017). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.
- Sembel, D. T. (2015). *Toksikologi lingkungan*. Penerbit Andi.
- Sudirman, & Massiri. (2022). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kawasan Konservasi* (Issue June).
- Wijaya, A. F., & Dinar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.